

**PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(STUDI KASUS PADA OPD DI KOTA BANDUNG)**

**Pembimbing :
Dr. Ony Widilestariningtyas, S.E., M.Si., Ak., CA**

**Oleh :
Paimisti Ragita Cahyani
21115019**

**Prodi Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
E-mail : Paimisti.ragita.cahyani@gmail.com**

ABSTRACT

Local government performance is the performance of local government organizations agencies. As for the phenomenon local government performanc there are 38 development programs that are late in completion. The purpose of this research are to know the description of public accountability, regional financial accounting systems and the performance of local government and determine their effect.

The methods used in this research are descriptive method and verificative method. Sampling used of this reserach with a purposive sampling technique that is 20 local government organizations (OPD) of the city Bandung, with 57 respondents. The results of this research that there is as strong relationship between public accontability and regional financial accounting systems and the performance of local government.

Whereas determination coefficient shows that comprehensive public accountability, regional financial accounting systems as much as 53,62% on the performance of local government while the research is influenced by other factors not examinde by researchers.

Keywords : *Public Accontability And Regional Financial Accounting Systems And The Performance Of Local Government*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Suatu negara pasti memiliki suatu pemerintahan yang berfungsi sebagai kesatuan dari organisasi-organisasi (Wawan dan Lia, 2009). Pemerintah dapat diartikan sebagai lembaga atau badan yang menjalankan pemerintahan negara, provinsi, atau kota dan sebagainya (Suhady dalam Riawan, 2009:197). Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki amanat untuk menjalankan tugas pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wawan dan Lia, 2009). Pemerintah daerah sekarang dituntut dari segi internal (peningkatan kerja yang optimal) dan segi eksternal (adanya tuntutan dari masyarakat yang menghendaki), agar pemerintah daerah dapat mampu mewujudkan tujuan masyarakat yang sejahtera sebagai timbal balik dari

penerapan otonomi daerah yang mengedepankan akuntabilitas kinerja dan peningkatan pelayanan publik (Rahmad Hidayat, 2015). Kinerja menjadi suatu hal yang penting dalam seluruh tahapan dalam penyelenggaraan di pemerintah daerah (Ira Halidayati, 2014). Pada dasarnya kinerja pemerintah daerah adalah suatu gambaran yang memuat terkait dengan tingkat pencapaian suatu kegiatan atau program atau kebijakan yang dilakukan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu organisasi (Mohamad Mahsun, 2013:25). Adapun fenomena Kinerja Pemerintah Daerah yang terjadi di Bandung yaitu berdasarkan paparan dari Walikota Bandung terdapat tiga OPD yang memiliki kinerja dibawah 50 atau

jauh dibawah kecamatan yang mendapat nilai 90. Hal ini mengakibatkan terancamnya 1.000 pegawai negeri sipil berkinerja rendah diberi sanksi dan tidak ada kenaikan pangkat dan tidak diberi tunjangan. Untuk mengetahui kinerja aparatur, maka digunakan aplikasi *Smart City* tunjangan kinerja daerah (TKD). Walikota Bandung pun telah mengevaluasi program-program yang sudah dibuat, dan terdapat sekitar 38 program pembangunan yang terlambat penyelesaiannya. Beberapa diantaranya pembangunan perumahan, apartemen, hingga dana retensi untuk pengendalian banjir (Ridwan Kamil, Walikota Bandung, 2017).

Suatu pemerintahan yang baik harus memberikan peluang untuk semua pihak yang terkait dalam pemerintahan tersebut agar dapat berperan aktif dan berpartisipasi secara aktif jalannya pemerintahan yang harus dapat dipertanggungjawabkan (Mardiasmo, 2002). Akuntabilitas publik adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. (Yusri Hazmi, Ali Imran, Zaumi, Teni Irawan, Said Herry Safrizal, 2012). Adapun Fenomena yang terjadi mengenai Akuntabilitas publik yaitu, menurut Menpan RB (Menteri Penyalahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), 425 pemerintah daerah di wilayah Sumatera, Banten dan Jabar (regional I) masih belum menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan baik, sehingga berpotensi pemborosan APBD, maka pemerintah daerah perlu lebih serius dalam memberikan perhatian pada tata kelola pemerintahan. Agar faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas publik dapat terlaksana. Maka pemerintah daerah di wilayah Sumatera, Banten dan Jabar (regional I) perlu melakukan evaluasi (Asman Abnur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2017).

Faktor lain yang menentukan suatu pemerintahan sukses dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah adalah sistem akuntansi keuangan daerah (Rahmat Hidayat, 2015). Kinerja pemerintah daerah dapat tercapai dengan dilaksanakannya sistem akuntansi keuangan daerah yang dapat menimbulkan dukungan yang kuat terhadap kinerja pemerintah daerah yang

ingin dicapai (Rahmat Hidayat, 2015). Sistem akuntansi keuangan daerah berhubungan terhadap kinerja pada dasarnya karena sistem akuntansi keuangan daerah yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai acuan agar tercapainya tujuan dan sasaran program (Mardiasmo, 2009:84). Selanjutnya fenomena dari sistem akuntansi keuangan daerah yaitu, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2015 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pada 2011 dan 2012, pemkab juga mendapat hasil serupa. Bahkan pada tahun 2013 sempat memperoleh opini Tidak Memberikan pendapat (TMP). Permasalahan dalam laporan Pemkab Bandung adalah lemahnya sistem akuntansi keuangan daerah yang berupa pencatatan transaksi yang tidak akurat atau transaksi yang tidak dicatat, kesalahan klasifikasi penganggaran belanja modal, penyajian dan pengelolaan saldo persediaan yang tidak memadai. Selain itu, penyajian aset tetap yang tidak didukung oleh daftar rincian aset maupun dokumen yang mendukungnya. Seperti penyajian jumlah dan nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada dinas sumber daya air, pertambangan dan energi sebanyak 937 unit dengan nilai aset sebesar Rp 143, 27 miliar yang belum dapat diyakini kebenarannya. Sehingga kelemahan dari pemerintah kabupaten Bandung adalah pengelolaan aset yang banyak tidak tercatat dan kesalahan dalam penilaian maupun pengklasifikasiannya (Maman Sunjaya, Sekertaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung, 2016).

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
2. Seberapa besar pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis informasi dan data yang relevan mengenai Akuntabilitas Publik, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kinerja Pemerintah Daerah serta untuk memperoleh gambaran perbandingan antara teori dengan pelaksanaannya di lapangan, guna diolah untuk dianalisis lebih lanjut.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah diharapkan dapat memecahkan masalah terkait dengan Akuntabilitas Publik, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana yang terdapat pada fenomena yang diangkat dalam penelitian ini baik bersifat umum maupun khusus, memberikan manfaat serta masukan yang berguna sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang mengenai praktik Akuntabilitas Publik dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah untuk meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandung dan memberikan solusi terkait dengan Akuntabilitas Publik yang buruk, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang buruk dan Kinerja Pemerintah Daerah yang buruk.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan selain itu mengembangkan ilmu, dimana teori yang telah ada diuji kembali dalam penelitian ini dapat memperkuat teori yang telah ada yaitu Akuntabilitas Publik dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dan diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu dan

pengetahuan serta menjadi bahan referensi yang khususnya mengkaji Akuntabilitas Publik dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini memuat teori-teori dari para pakar maupun dari peneliti terdahulu yang digunakan sebagai konsep penelitian ini dan landasan teori berupa premis yang dapat digunakan sebagai data konfirmasi penelitian ini yang mengkaji mengenai Akuntabilitas Publik, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Kinerja Pemerintah Daerah.

2.1.1. Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik adalah pertanggung jawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. (Yusri Hazmi, Ali Imran, Zaumi, Teni Irawan, Said Herry Safrizal, 2012).

Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini menurut Mardiasmo (2002:21) yaitu:

1. Kejujuran dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*)
2. Proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi.
3. Program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah. Atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

2.1.2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan,

penggolongan dan peringkasan atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Abdul Halim, 2014:83).

Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini menurut Abdul Halim (2014:44) yaitu:

1. Pencatatan
2. Pengikhtisaran atau penggolongan
3. Pelaporan

2.1.3. Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Fadel Muhamad (2008:14) yang dimaksud dengan kinerja pemerintah daerah merupakan kinerja dari organisasi atau instansi pemerintah daerah.

Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini menurut (Mohammad Mahsun, 2013:77) yaitu:

1. Indikator masukan (*input*)
2. Indikator proses (*process*)
3. Indikator keluaran (*output*)
4. Indikator hasil (*outcome*)
5. Indikator manfaat (*benefit*)
6. Indikator dampak (*impact*)

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Suwandi (2015:21) menyatakan bahwa akuntabilitas publik yang baik, sehingga memungkinkan masyarakat untuk memantau kinerja aparat pemerintah daerah dan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk merespon secara proporsional terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian ini juga didukung dengan hasil penelitian terdahulu seperti menurut Asrini (2017), menyimpulkan bahwa Akuntabilitas Publik berpengaruh terhadap kinerja SKPD di Pemerintah Kota Palu hal ini sejalan dengan hipotesis penelitian. Akuntabilitas Publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD di Pemerintah Kota Palu. Selain itu menurut Hari Eka Setiayawan dan Muhammad Safri (2016), menyimpulkan bahwa Akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo. Dan menurut

Nopriansyah Putra, Erlina dan Tapi Anda Sari (2016), menyimpulkan bahwa Akuntabilitas Publik Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

2.2.2 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Mardiasmo (2009:84) bahwa hubungan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dengan kinerja Instansi Pemerintah yaitu sistem akuntansi keuangan daerah berhubungan terhadap kinerja yang pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program untuk penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut.

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu seperti Menurut Novita Lerly Djiloy (2016) menyimpulkan bahwa Semakin baik pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi maka akan semakin baik pula kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi. Selain itu menurut Vivid Annisa (2017), menyimpulkan bahwa Sistem akuntansi dapat memberikan informasi atas keuangan yang telah terlaksana sesuai dengan yang telah ditetapkan, dengan demikian dapat dikatakan sistem akuntansi keuangan daerah dapat menimbulkan dukungan terhadap kinerja SKPD. dan menurut Rusli Rusli (2015), menyimpulkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja SKPD perlu suatu sistem yang mengatur proses pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan seluruh transaksi keuangan yang disebut dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan dari kerangka pemikiran diatas, maka peneliti perlu berasumsi mengambil keputusan sementara (hipotesis) sebagai berikut:

H₁ : Akuntabilitas Publik berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

H_2 : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Menurut Umi Narimawati (2010:29), metode penelitian merupakan cara penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data untuk mencapai tujuan tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif dan metode penelitian verifikatif. Menurut Asep Saepul Hamdi dan E Bahruddin (2014:5), penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan fenomena yang sudah ada dan yang berlangsung pada saat ini atau yang sudah lampau. Sedangkan metode verifikatif menurut Moch. Nazir (2011:91) adalah metode verifikatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antar variabel melalui suatu pengujian hipotesis melalui suatu perhitungan statistik sehingga didapat hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima. Alat uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu SEM-PLS 3.0 dengan metode pendekatan kuantitatif.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Publik (X_1), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) dan Kinerja Pemerintah Daerah (Y). Unit analisis pada penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bandung dengan unit observasi yang dituju adalah Kepala Dinas, Bagian Keuangan dan Staf.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2017:39), menyatakan bahwa operasionalisasi variabel adalah suatu atribut seseorang atau obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan judul yang peneliti ambil pada penelitian ini yaitu mengenai pengaruh akuntabilitas publik dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja

pemerintah daerah, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 variabel yaitu:

1. Variabel bebas atau *Independent Variable* (Variabel X_1 dan X_2)
Menurut Sugiyono (2017:39), variabel bebas adalah variabel yang akan mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen pada penelitian ini adalah Akuntabilitas Publik (X_1) dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2).
2. Variabel terikat atau *Dependent Variable* (Variabel Y)
Menurut Sugiyono (2017:39), variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependent dalam hal ini adalah Kinerja Pemerintah Daerah (Y).

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan pada penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiyono (2017:137), Sumber Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)
 - a. Observasi, Melakukan pengamatan secara langsung pada OPD Kota Bandung untuk memperoleh data yang diperlukan.
 - b. Kuesioner, Menurut Umi Narimawati (2010:40), kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya.
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelaah literatur berupa buku-buku (*text book*), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, artikel, situs web dan penelitian-penelitian yang

sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti

3.4 Metode Pengambilan Sampel

Populasi pada penelitian ini sebanyak 60 responden yang terdiri dari Kepala dinas, Bagian keuangan dan staf pada 20 OPD di Kota Bandung. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling purposive*. Menurut Sugiyono (2017:85) pengertian dari *sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

3.5 Metode Pengujian Data

3.5.1 Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2017:267) validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi di objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Berdasarkan uraian definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa uji validitas adalah ketepatan atau alat ukur yang digunakan dengan kuesioner yang dirancang oleh peneliti dapat benar-benar diukur.

3.5.2 Uji Realibilitas

Menurut Cooper yang dikutip oleh Umi Narimawati, dkk. (2010:43) realibilitas adalah *Reliability is a characteristic of measurement concerned with accuracy, precision, and consistency*.

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Analisis Data Deskriptif

Menurut Sugiyono (2017:174), analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Adapun alat uji untuk analisis data deskriptif yaitu menggunakan SPSS 20.0

3.6.2 Analisis Data verifikatif

Analisis verifikatif verifikatif digunakan untuk menguji hipotesis menggunakan statistik yaitu dengan Model Persamaan Struktural (*Structural Equation Model*) dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS) menggunakan software SmartPLS 3.0.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini mengenai pengaruh Akuntabilitas Publik dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

4.1.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan metode penelitian lapangan, yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner kepada objek penelitian untuk mengetahui jawaban responden mengenai pengaruh akuntabilitas publik dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Kuesioner yang disebarkan ke 60 responden pada 20 OPD di Kota Bandung dengan jumlah kuesioner tiap dinasnya sebanyak 3 Kuesioner. Kuesioner yang kembali sebanyak 57 kuesioner dan sisanya sebanyak 3 kuesioner tidak kembali dikarenakan kuesioner yang hilang di tempat kerja responden

4.1.2 Pengukuran Kualitas Alat Ukur Penelitian

Sebelum melakukan analisis, data harus diuji terlebih dahulu baik secara validitas maupun reliabilitas dengan maksud untuk menguji apakah alat ukur yang digunakan memiliki kesahihan (*validity*) dan (*reliability*) berupa butir *item* pernyataan yang telah diajukan kepada responden.

1. Uji Validitas

Uji validitas bermaksud untuk mengetahui apakah suatu kuesioner itu valid atau tidak valid. Dikatakan valid apabila pernyataan kuesioner mampu mengungkapkan hal yang akan diukur oleh kuesioner itu sendiri. Suatu alat ukur dikatakan valid atau sah apabila memiliki nilai koefisien validitas $> 0,30$. dengan menggunakan SPSS 20.0. Nilai koefisien validitas variabel akuntabilitas publik, sistem akuntansi keuangan daerah, dan kinerja pemerintah daerah menunjukkan nilai yang lebih besar dari titik kritis yaitu 0,3, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan tersebut dinyatakan valid

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ini bertujuan untuk menguji suatu alat ukur penelitian. Dalam pengujian ini menggunakan teknik belah dua (*split half method*) yang mana dikatakan reliabel apabila melebihi titik kritis 0,7. Hasil uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS 20.0. Hasil pengujian reliabilitas dengan melihat nilai *spearman brown* pada masing-masing variabel akuntabilitas publik, sistem akuntansi keuangan daerah dan kinerja pemerintah daerah menunjukkan angka lebih besar dari 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan reliabel dan jawaban yang telah diberikan oleh responden terkait dengan pernyataan dapat dipercaya.

4.1.3 Hasil Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan tanggapan pernyataan yang diberikan kepada tiap responden mengenai Akuntabilitas Publik, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kinerja Pemerintah Daerah. Tanggapan yang diberikan oleh responden akan disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan persentase sehingga memudahkan peneliti dalam menjelaskan hasil tanggapan responden.

1. Tanggapan Responden Mengenai Akuntabilitas Publik
Hasil analisis deskriptif mengenai akuntabilitas publik menunjukkan kriteria cukup baik (64,82%). Hasil analisis deskriptif mengenai akuntabilitas publik dapat dilihat pada tabel 4.1.
2. Tanggapan Responden Mengenai Sistem Akuntansi Keuangan
Hasil analisis deskriptif mengenai sistem akuntansi keuangan daerah menunjukkan kriteria cukup baik (65,61%). Hasil analisis deskriptif mengenai akuntabilitas publik dapat dilihat pada tabel 4.2.
3. Tanggapan Responden Mengenai Kinerja Pemerintah Daerah
Hasil analisis deskriptif mengenai kinerja pemerintah daerah menunjukkan kriteria cukup baik (67,77%). Hasil analisis deskriptif

mengenai akuntabilitas publik dapat dilihat pada tabel 4.3.

4.1.4 Hasil Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif bertujuan untuk menguji hipotesis berdasarkan hasil perhitungan statistik. Hipotesis yang diajukan yaitu adanya Akuntabilitas Publik dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yaitu *Structural Equation Modelling* (SEM) melalui pendekatan *Partial Least Square* (PLS). Terdapat 2 jenis model yang terbentuk dalam *Structural Equation Modelling*, yaitu model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*).

1. Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)
 - a. Hasil pengujian validitas dengan melihat *Convergency Validity*. Syarat untuk menilai *convergency validity* yaitu harus bernilai lebih dari 0,5-0,6 termasuk kategori cukup, dan nilai $>0,7$ termasuk kategori tinggi yang dapat dilihat pada tabel 4.4, sedangkan nilai *average variance extracted* (AVE) dan nilai *communality* harus $\geq 0,5$ yang dapat dilihat pada tabel 4.5. sehingga dapat dikatakan bahwa semua variabel dalam penelitian ini memiliki validitas yang baik. Selain itu apabila melihat dari nilai *discriminant validity* baik itu dari *cross loading factor* pada tabel 4.6 maupun perbandingan akar AVE dengan variabel laten pada tabel 4.7, keduanya memiliki nilai korelasi yang lebih tinggi antara variabel dengan indikatornya daripada pengukuran dengan yang lainnya.
 - b. Hasil pengujian reliabilitas pada tabel 4.8 dengan melihat nilai *composite reliability* bahwa syarat reliabel adalah $>0,7$ dan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai dari *composite reliability* baik itu variabel Akuntabilitas Publik, sistem akuntansi keuangan maupun kinerja pemerintah daerah semuanya berada diatas 0,7 berarti

data tersebut mempunyai nilai reliabilitas yang tinggi.

- c. Standar dari nilai GoF adalah $\geq 0,36$ termasuk kriteria besar, dan hasil pengujian pada tabel 4.9 menunjukkan angka 0,560 yang berarti nilai GoF sudah terpenuhi.
2. Pengujian Model Struktural (*Inner Model*).
 - a. Akuntabilitas publik memberikan pengaruh lebih besar terhadap kinerja pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel 4.10. begitu pula dengan hasil pengujian hipotesis yang dapat dilihat pada tabel 4.11.
 - b. Sistem akuntansi keuangan daerah memberikan pengaruh lebih kecil terhadap kinerja pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel 4.12. begitu pula dengan hasil pengujian hipotesis yang dapat dilihat pada tabel 4.13.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 4,555 lebih besar dari t_{tabel} (2.002) yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Artinya Akuntabilitas Publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Bandung.

Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah yaitu sebesar 32.43% yang artinya bahwa Akuntabilitas Publik terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kantor Pemerintahan Kota Bandung.

Penelitian ini menjawab fenomena. Hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan membuktikan bahwa akuntabilitas publik mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 64.82% dan termasuk kategori cukup baik. Hal itu dibuktikan oleh indikator yang paling tinggi tanggapan respondennya adalah indikator kebijakan terkait pertanggungjawaban sebesar 66.32%. Terdapat *gap* sebesar 33,68% yang merupakan masalah yang ada pada akuntabilitas publik. Selanjutnya kinerja pemerintah daerah mempunyai persentase

tanggapan responden sebesar 67,77% dan masuk dalam kategori cukup baik yang artinya kinerja pemerintah daerah cukup baik. Hal itu dibuktikan oleh indikator yang paling tinggi tanggapan respondennya adalah indikator *impact* sebesar 69.47%, namun masih terdapat *gap* sebesar 30.53%.

Hasil penelitian ini mendukung teori yang menyatakan bahwa Akuntabilitas Publik berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, dimana Akuntabilitas Publik sangat diperlukan dalam mencapai tujuan pemerintah yang dibarengi dengan Kinerja Pemerintah Daerah yang baik. Berdasarkan yang dikemukakan oleh Suwandi (2015:21) yang menyatakan bahwa Akuntabilitas Publik yang baik, sehingga memungkinkan masyarakat untuk memantau kinerja aparat pemerintah daerah dan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk merespon secara proporsional terhadap kinerja pemerintah daerah.

Serta hasil penelitian terdahulu menurut Asrini (2017) yang menyimpulkan bahwa Akuntabilitas Publik berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Selaras dengan Asrini, Hari Eka Setiayawan dan Muhammad Safri (2016), menyimpulkan bahwa Akuntabilitas publik berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Dan menurut Nopriansyah Putra, Erlina dan Tapi Anda Sari (2016), menyimpulkan bahwa Akuntabilitas Publik Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

4.2.2 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2.970 lebih besar dari t_{tabel} (2.002) yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 2 signifikan. Artinya sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandung.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah yaitu sebesar 21.19% yang artinya bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kantor Pemerintahan Kota Bandung.

Penelitian ini menjawab fenomena. Hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan membuktikan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 65,61% dan termasuk kategori cukup baik yang artinya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah cukup baik. Hal itu dibuktikan oleh indikator yang paling tinggi tanggapan respondenya adalah indikator pengiktisaran dan penggolongan sebesar 69.82%. Terdapat *gap* sebesar 30.18% yang merupakan masalah yang ada pada Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Selanjutnya kinerja pemerintah daerah mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 67,77% dan masuk dalam kategori cukup baik yang artinya kinerja pemerintah daerah cukup baik. Hal itu dibuktikan oleh indikator yang paling tinggi tanggapan respondennya adalah indikator *impact* sebesar 69.47%, namun masih terdapat *gap* sebesar 30.53%.

Hasil penelitian ini mendukung teori yang menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, dimana Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sangat diperlukan dalam mencapai tujuan pemerintah yang dibarengi dengan Kinerja Pemerintah Daerah yang baik. Berdasarkan yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2009:84) bahwa hubungan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dengan kinerja Instansi Pemerintah yaitu sistem akuntansi keuangan daerah berhubungan terhadap kinerja yang pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program untuk penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut.

Serta hasil penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Novita Lerly Djiloy (2016) bahwa semakin baik pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah yang dilakukan Pemerintah Daerah maka akan semakin baik pula Kinerja Pemerintah Daerah. Selaras dengan Novita Lerly Djiloy, Vivid Annisa (2017) menyimpulkan bahwa Sistem akuntansi dapat memberikan informasi atas

keuangan yang telah terlaksana sesuai dengan yang telah ditetapkan, dengan demikian dapat dikatakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat menimbulkan dukungan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Dan Rusli Rusli (2015), menyimpulkan bahwa dalam rangka meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah perlu suatu sistem yang mengatur proses pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan seluruh transaksi keuangan yang disebut dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kuesioner dalam pembahasan mengenai pengaruh akuntabilitas publik dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah (studi kasus pada OPD Kota Bandung), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Publik berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (studi kasus pada OPD Kota Bandung), dimana semakin tinggi Akuntabilitas Publik akan membuat Kinerja Pemerintah Daerah (studi kasus pada OPD Kota Bandung) akan meningkat. Keterlibatan Akuntabilitas Publik yang baik terwujud dengan keterlibatan para pegawai dalam membuat program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (studi kasus pada OPD Kota Bandung), dimana semakin tinggi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah akan membuat Kinerja Pemerintah Daerah (studi kasus pada OPD Kota Bandung) akan meningkat. Keterlibatan dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang baik terwujud dengan keterlibatan para pegawai dalam pencatatan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mencoba memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan sebagai bahan pertimbangan bagi pegawai pada Dinas Pemerintah Kota Bandung ataupun peneliti selanjutnya, antara lain:

1. Agar Akuntabilitas Publik dapat meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah dengan optimal, OPD Kota Bandung harus melakukan evaluasi terhadap para pegawai yang membuat dan menjalankan program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal agar penerapan SAKIP dapat diterapkan dengan baik.
2. Sistem akuntansi keuangan daerah yang baik dapat dinilai dari beberapa point tanggapan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menangani sistem akuntansi keuangan daerah, pencatatan di OPD Kota Bandung lebih teliti dan dilakukan evaluasi kembali agar tidak terjadi kekeliruan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Salemba Empat.
- Asep Saepul Hamdi, E. Bahrudin. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublisher.
- Asrini. 2017. *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Penyusun Anggaran terhadap Kinerja SKPD di Pemerintah Daerah Kota Palu*. Palu: Universitas Tadolako.
- Bayu Anggoro. 2017. *Buruk, Kinerja OPD Kota Bandung*. Melalui: <<https://mediaindonesia.com/read/detail/106795-buruk-kinerja-tiga-opd-kota-bandung>>
- Fadel Muhamad. 2008. *Kinerja Pemerintah Daerah Merupakan Kinerja Dari Organisasi Atau Instansi Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kompas Gramedia. EMK: 238081717. ISBN: 978-979-27-3367-9.
- Hari Eka Setiawan dan Muhammad Safri. 2016. *Analisis Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Publik, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bungo*. Jambi: Universitas Jambi. ISSN (Print): 2338-4603. ISSN (Online): 2355-8520.
- Ira Halidayati. 2014. *Pengaruh Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal, dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh)*. Jurnal. Universitas Negeri Padang.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Moh Nazir. 2011. *Metode Penelitian*. Cetakan 6. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Mohammad Mahsun. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta. BPFE-Yogyakarta.
- Nopriansyah putra., et. Al. 2016. *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Pengawasan sebagai Variable Moderating pada Provinsi Sumatera Utara*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.

- Novita Lerly Dijloy. 2016. *Pengaruh Pengawasan Intern, Perencanaan, Dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Skpd Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi*. Sigi: Universitas Sigi. ISSN: 2302-2019.
- Nurhayati. 2018. *Kejar Bangka Setara, Kepala OPD Tidak Bisa Kerja Terancam Mutasi*. Melalui: <<http://bangka.tribunnews.com/2018/10/04/kejar-bangka-setara-kepala-opd-tidak-bisa-kerja-terancam-mutasi?page=1>>
- Rahmad Hidayat. 2015. *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Padang Pariaman)*. Jurnal Akuntansi. Universitas Negeri Padang. Padang. Vol.3, No.1.
- Riawan Tjandra. 2009. *Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Rusli Rusli. 2015. *Pengaruh Good Governance, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Jom FEKON Vol. 2 No. 2 Oktober 2015.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwandi. 2015. *Desentralisasi fiskal dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, kemiskinan, dan kesejahteraan di kabupaten/kota induk provinsi papua*. Yogyakarta: Deepublish. ISSN : 978-602-401-387-5.
- Syafruddin. 2019. *Rapor Akuntabilitas Kinerja, Jabar dan Bandung Pertahankan Predikat A, 20 Pemda Berpredikat BB*. Melalui: <<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/rapor-akuntabilitas-kinerja-jabar-dan-bandung-pertahankan-predikat-a-20-pemda-berpredikat-bb>>
- Umi Narimawati, Sri Dewi Anggadini, Linna Ismawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: GENESIS.
- Vivid Annisa. 2017. *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. JOM Fekon, Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017.
- Wawan Sukmana dan Lia Anggarsari. 2009. *Pengaruh Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. ISSN:1907 – 9958
- Yusri Hazmi, Ali Imran, Zaumi, Yeni Irawan, Said Herry Safrizal. 2012. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial Aparatur Pemerintahan Kota Lhokseumawe, Studi Empiris pada SKPK Lhokseumawe*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume 13 No. 2. Agustus 2012.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Tabel 4.1

Persentase Skor Tanggapan Responden Mengenai Variabel Akuntabilitas Publik

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
----	-----------	-------------	------------	---------------	----------

1	Kejujuran dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (<i>abuse of power</i>)	187	285	67,37%	Cukup Baik
2	Proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi	186	285	67,02%	Cukup Baik
3	Program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal	177	285	62.11%	Cukup Baik
4	Kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah.	189	285	66.32%	Cukup Baik
Total		739	1140	64.82%	Cukup Baik

Tabel 4.2

Persentase Skor Jawaban Responden Mengenasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%Skor Aktual	Kriteria
1	Pencatatan	163	285	57.19%	Cukup Baik
2	Pengikhtisaran dan penggolongan	199	285	69.82%	Baik
3	Pelaporan	199	285	69.82%	Baik
Total		561	855	65.61%	Cukup Baik

Tabel 4.3

Persentase Skor Jawaban Responden Mengenasi Variabel Kinerja Pemerintah Daerah

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%Skor Aktual	Kriteria
1	Indikator masukan (<i>input</i>)	195	285	68.42%	Baik
2	Indikator proses (<i>process</i>)	193	285	67.72%	Cukup Baik
3	Indikator keluaran (<i>output</i>)	186	285	65.26%	Cukup Baik
4	Indikator hasil (<i>outcome</i>)	193	285	67.72%	Cukup Baik
5	Indikator manfaat (<i>benefit</i>)	194	285	68.07%	Baik
6	Indikator dampak (<i>impact</i>)	198	285	69,47%	Baik
Total		1159	1710	67,77%	Cukup Baik

Tabel 4.4

Loading Factor

	Loading Factor	Keterangan
X1.1	0,850460	Valid
X1.2	0,811682	Valid
X1.3	0,861461	Valid
X1.4	0,722090	Valid
X2.1	0,716707	Valid
X2.2	0,804005	Valid
X2.3	0,899081	Valid

Y.1	0,741004	Valid
Y.2	0,770816	Valid
Y.3	0,858534	Valid
Y.4	0,762718	Valid
Y.5	0,730457	Valid
Y.6	0,723932	Valid

Tabel 4.5
AVE

	AVE	Communalty
x1	0,661410	0,661410
x2	0,656146	0,656146
y	0,586618	0,586618

Tabel 4.6
Cross Loading Factor

	x1	x2	y
X1	0,850460	0,555032	0,564273
X1.2	0,811682	0,510112	0,562742
X1.3	0,861461	0,685108	0,618075
X1.4	0,722090	0,488758	0,505270
X2.1	0,630851	0,716707	0,571564
X2.2	0,470273	0,804005	0,504168
X2.3	0,553875	0,899081	0,477864
Y.1	0,610274	0,545986	0,741004
Y.2	0,475025	0,504774	0,770816
Y.3	0,596993	0,556737	0,858534
Y.4	0,582494	0,534786	0,762718
Y.5	0,451549	0,409315	0,730457
Y.6	0,419433	0,392808	0,723932

Tabel 4.7
Perbandingan Akar AVE dengan Korelasi Variabel Laten

Variabel Laten	Akar AVE
X ₁	0,813
X ₂	0,810

Korelasi Antar Variabel Laten			
	X ₁	X ₂	Y
X ₁	1,000		

Y	0,765	X ₂	0,692849	1,000	
		Y	0,693799	0,650169	1,000

Tabel 4.8
Composite Reliability

	Composite Reliability
x1	0,886082
x2	0,850215
y	0,894568

Tabel 4.9
Hasil Nilai GoF

	Communality	R-Square
Variabel Y	0,586	0,536
Perkalian	0,314	
Nilai GoF	0,560	

Tabel 4.10
Analisis Koefisien Determinasi (R²)

	Koefisien Jalur Struktural	Korelasi dengan Y	Pengaruh (%)
Akuntabilitas Publik (X ₁) → Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	0,468	0,693	32,43%
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X ₂) → Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	0,326	0,650	21,19%
Total Pengaruh (R²)			53,62%

Tabel 4.11
Uji t Akuntabilitas Publik (X₁) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Variabel Laten	Koefisien Jalur	t _{statistik}	t _{kritis}	Keterangan	Kesimpulan
X ₁ → Y	0,468	4,555	2,002	H ₀ ditolak	Signifikan

Tabel 4.12
Uji t Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X₂) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Variabel Laten	Koefisien Jalur	t _{statistik}	t _{kritis}	Keterangan	Kesimpulan
X ₂ → Y	0,326	2,970	2,002	H ₀ ditolak	Signifikan